



Dampak Kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Merauke

Yulianus Tuakara

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke

yulianustakra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali dinamika pelaksanaan Dana Otsus dalam konteks pembangunan pendidikan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, kebijakan, serta peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, aparatur pemerintah distrik, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, dengan analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Otsus memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlambatan distribusi dana dan ketidakmerataan alokasi antar sekolah menghambat efektivitas program, sementara kapasitas sumber daya manusia di tingkat distrik yang terbatas serta koordinasi antar lembaga yang kurang optimal turut memperburuk implementasi. Masyarakat lokal juga belum terlibat secara maksimal dalam pengawasan dan evaluasi, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas SDM, serta keterlibatan lebih aktif dari masyarakat untuk memaksimalkan dampak positif Dana Otsus dalam sektor pendidikan di Distrik Malind.

Kata kunci: Dana Otonomi Khusus; Peningkatan Sarana dan Prasarana; Pendidikan; Kebijakan Publik; Implementasi Program

1. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diterapkan di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Merauke, merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini adalah alokasi Dana Otsus yang cukup besar setiap tahunnya, dengan harapan dapat memperbaiki ketertinggalan infrastruktur pendidikan serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan[1]. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana pendidikan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, mengingat keberadaannya sangat menentukan proses belajar-mengajar yang efektif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik[2]. Kabupaten Merauke sebagai salah satu daerah penerima Dana Otsus memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang khas, yang memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Meskipun Dana Otsus telah dikurirkan sejak tahun 2002, masih terdapat tantangan dalam pemerataan dan kualitas pembangunan sarana pendidikan, seperti keterbatasan ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, dan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana Dana Otsus benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kondisi fisik pendidikan di Merauke, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah dan instansi terkait telah menunjukkan berbagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan melalui pemanfaatan Dana Otsus[3]. Namun, efektivitas dan keberlanjutan dari program-program tersebut seringkali dipertanyakan, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta dampak riil terhadap peningkatan mutu pendidikan[4]. Studi mengenai dampak kebijakan Dana Otsus terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi

penting untuk memberikan gambaran objektif atas pelaksanaan program dan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Meskipun Dana Otonomi Khusus telah dialokasikan untuk sektor pendidikan, Distrik Malind masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu masalah yang menonjol adalah minimnya ketersediaan ruang kelas yang layak dan memadai, terutama di sekolah-sekolah yang berada di kampung-kampung terpencil. Banyak bangunan sekolah yang sudah mengalami kerusakan fisik, seperti atap bocor, lantai rusak, serta dinding yang rapuh, namun belum mendapat perhatian serius dalam program rehabilitasi dan pembangunan.

Selain itu, akses terhadap fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran berbasis teknologi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu proses belajar mengajar, karena guru dan siswa tidak memiliki sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran aktif dan kreatif. Di beberapa sekolah, bahkan masih terdapat kekurangan meja, kursi, dan peralatan dasar lainnya, yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan konsentrasi belajar siswa. Masalah lainnya adalah keterlambatan distribusi dan kurangnya transparansi dalam penggunaan Dana Otsus yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan sarana pendidikan di Distrik Malind. Kurangnya koordinasi antara pemerintah distrik, dinas pendidikan, dan sekolah menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana menjadi tidak efektif. Akibatnya, kebutuhan riil di lapangan tidak selalu terakomodasi secara tepat. Selain itu, tantangan geografis dan kondisi infrastruktur jalan yang masih terbatas juga menghambat mobilisasi bahan bangunan dan tenaga kerja ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur pendidikan berlangsung lambat, bahkan tidak jarang proyek pembangunan tertunda dalam jangka waktu lama. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Otsus tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala struktural dan manajerial, khususnya di Distrik Malind.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam pembangunan sektor pendidikan di Papua secara umum, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama terkait dengan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat makro dan terfokus pada tingkat provinsi atau kabupaten, tanpa mengulas secara mendalam implementasi dana di tingkat distrik yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri[5]. Selain itu, belum banyak studi yang mengungkap hambatan teknis, administratif, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis Dana Otsus di daerah pedalaman. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menyoroti kondisi riil di Distrik Malind agar dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual bagi pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai secara objektif efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil, khususnya Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Mengingat pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, maka ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi secara merata. Dengan mengevaluasi dampak kebijakan Dana Otsus di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi strategis guna mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, mempercepat pencapaian tujuan otonomi khusus, dan memastikan bahwa setiap anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam realitas sosial dan kebijakan yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual, serta menelaah dinamika kebijakan yang tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan teknis, tetapi juga dari perspektif sosial dan kultural masyarakat lokal. Lokasi penelitian difokuskan di Distrik Malind karena wilayah ini mewakili karakteristik daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga menjadi titik krusial dalam melihat efektivitas distribusi dan implementasi Dana Otsus di sektor pendidikan. Subjek penelitian meliputi berbagai pemangku kepentingan, antara lain kepala sekolah, guru, aparat pemerintah distrik, tokoh masyarakat, komite sekolah, serta pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke. Para informan dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta pengawasan pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali perspektif dan pengalaman para informan, observasi langsung terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana di sekolah-sekolah, serta studi dokumentasi terhadap laporan penggunaan Dana Otsus, dokumen perencanaan pendidikan, dan kebijakan daerah terkait. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi, yang semuanya disusun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan validasi temuan melalui member checking kepada para informan utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh, kritis, dan konstruktif mengenai dampak kebijakan Dana Otsus terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh oleh kajian akademik secara mendalam.

3. Hasil dan Diskusi

Fokus utama penelitian adalah untuk memahami berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi Dana Otsus, serta dampaknya terhadap mutu dan akses pendidikan. Hasil penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana program ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta tantangan yang masih harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Tabel 1: Realisasi Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Distrik Malind

Aspek	Temuan Penelitian	Penjelasan
Alokasi Dana Otsus untuk Pendidikan	Dana Otsus dialokasikan secara rutin untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di Distrik Malind.	Alokasi Dana Otsus telah tersedia setiap tahun dan difokuskan pada pembangunan fisik seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, serta renovasi infrastruktur pendidikan yang rusak.
Peningkatan Anggaran	Terdapat peningkatan anggaran Dana Otsus dari tahun ke tahun, tetapi penyerapan dana belum optimal.	Meskipun ada peningkatan anggaran setiap tahunnya, penyerapan anggaran sering terhambat karena faktor administratif, keterlambatan pengajuan proposal, dan kendala teknis lainnya.
Distribusi Dana	Proses distribusi dana sering terlambat dan tidak merata antar sekolah di Distrik Malind.	Keterlambatan distribusi dana disebabkan oleh masalah koordinasi antar instansi pemerintah serta tantangan geografis yang menghambat akses distribusi ke sekolah-sekolah terpencil.

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan di Distrik Malind menunjukkan alokasi dana yang rutin dilakukan setiap tahun untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Meskipun terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, penyerapan dana belum optimal akibat hambatan administratif dan teknis, seperti keterlambatan pengajuan proposal dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, distribusi dana sering kali terlambat dan tidak merata antar sekolah, terutama di daerah terpencil, yang disebabkan oleh tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi yang efisien.

Tabel 2 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Distrik Malind

Aspek	Temuan Penelitian	Penjelasan
Perbaikan Fisik Sarana Pendidikan	Beberapa sekolah mengalami perbaikan fisik gedung, ruang kelas, serta fasilitas dasar seperti toilet dan ruang guru.	Perbaikan fisik dilakukan di beberapa sekolah yang telah mendapat prioritas, namun perbaikan ini masih terbatas pada beberapa fasilitas dasar dan belum mencakup seluruh sekolah di daerah.
Bangunan dan Fasilitas Minim	Masih terdapat sekolah dengan bangunan semi permanen dan fasilitas yang minim, terutama di kampung-kampung terpencil.	Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih menggunakan bangunan semi permanen dan memiliki fasilitas yang sangat terbatas, mempengaruhi kenyamanan dan kelayakan proses pembelajaran.
Ketersediaan Mebel dan Fasilitas Lainnya	Ketersediaan mebel sekolah, alat peraga pendidikan, serta jaringan listrik/internet masih terbatas.	Banyak sekolah kekurangan peralatan seperti meja dan kursi yang layak, serta alat peraga pendidikan. Akses terhadap listrik dan internet juga terbatas, menghambat pembelajaran modern.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Beberapa sekolah mengalami perbaikan fisik pada gedung, ruang kelas, dan fasilitas dasar seperti toilet dan ruang guru, namun masih banyak sekolah yang menggunakan bangunan semi permanen dengan fasilitas yang terbatas, terutama di kampung-kampung terpencil. Selain itu, ketersediaan mebel sekolah, alat peraga pendidikan, serta akses terhadap jaringan listrik dan internet masih sangat terbatas, yang mempengaruhi kualitas dan kenyamanan dalam proses pembelajaran.

Tabel 3 Peran Stakeholder dan Pelaksanaan Program Dana Otonomi Khusus di Distrik Malind

Aspek	Temuan Penelitian	Penjelasan
Peran Dinas Pendidikan dan Pihak Distrik	Dinas Pendidikan dan pihak distrik memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaporan pelaksanaan Dana Otsus.	Dinas Pendidikan dan pihak distrik berfungsi sebagai pengelola utama Dana Otsus, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaporan, serta pengawasan terhadap implementasi dana.
Partisipasi Kepala Sekolah dan Komite	Partisipasi kepala sekolah dan komite sekolah dalam perencanaan pembangunan meningkat, tetapi belum merata antar sekolah.	Walaupun kepala sekolah dan komite sekolah mulai terlibat lebih aktif dalam perencanaan, tingkat partisipasi mereka masih bervariasi antar sekolah, terutama di daerah terpencil.
Keterlibatan Masyarakat Lokal	Masyarakat lokal belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi program.	Masyarakat, terutama di tingkat kampung, masih minim terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi, padahal mereka berperan penting dalam memastikan keberhasilan program secara langsung.

Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus di Distrik Malind melibatkan berbagai stakeholder dengan peran yang berbeda. Dinas Pendidikan dan pihak distrik memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana, namun partisipasi kepala sekolah dan komite sekolah dalam perencanaan pembangunan masih belum merata antar sekolah. Meskipun ada peningkatan keterlibatan, terutama di beberapa sekolah, partisipasi mereka masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, masyarakat lokal belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi program, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 4: Hambatan dalam Implementasi Dana Otonomi Khusus dan Dampaknya terhadap Mutu dan Akses Pendidikan di Distrik Malind

Aspek	Temuan Penelitian	Penjelasan
Hambatan dalam Implementasi Dana Otsus	Masalah geografis dan akses transportasi menyebabkan keterlambatan distribusi material pembangunan.	Akses yang sulit dan kondisi geografis yang terpencil menghambat distribusi material ke sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah sulit dijangkau, memperlambat implementasi pembangunan.
	Kapasitas SDM pelaksana program di tingkat distrik masih terbatas, terutama dalam hal administrasi dan pelaporan.	Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat distrik, baik dalam kapasitas teknis maupun administrasi, menghambat pengelolaan dan pelaporan yang efisien dalam program Dana Otsus.
	Koordinasi antar lembaga belum optimal, menyebabkan duplikasi program atau pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan.	Kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga terkait menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas di lapangan.
Dampak terhadap Mutu dan Akses Pendidikan	Infrastruktur yang membaik berdampak pada peningkatan kenyamanan belajar, tetapi belum signifikan terhadap kualitas pembelajaran.	Perbaikan infrastruktur meningkatkan kenyamanan belajar, namun dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran belum signifikan, karena masih terdapat kekurangan dalam hal pengajaran.
	Masih ada ketimpangan antara sekolah yang mendapat prioritas pembangunan dan sekolah yang tertinggal.	Sekolah-sekolah tertentu mendapatkan prioritas dalam pembangunan, namun banyak sekolah lain yang masih tertinggal, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak mendapat perhatian yang cukup.
	Akses pendidikan secara umum meningkat, tetapi perlu didukung dengan peningkatan mutu guru dan fasilitas belajar yang memadai.	Meskipun akses pendidikan meningkat, kualitas pendidikan belum sepenuhnya merata, karena perlu dukungan dalam hal peningkatan kemampuan guru dan kelengkapan fasilitas belajar.

Implementasi Dana Otonomi Khusus di Distrik Malind menghadapi sejumlah hambatan, seperti masalah geografis yang menghambat distribusi material pembangunan, keterbatasan kapasitas SDM pelaksana program, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan duplikasi program. Meskipun infrastruktur yang membaik memberikan kenyamanan belajar, dampaknya terhadap kualitas pembelajaran belum signifikan. Ketimpangan antara sekolah yang mendapat prioritas pembangunan dan yang tertinggal masih ada, dan meskipun akses pendidikan meningkat, peningkatan mutu guru dan fasilitas belajar masih diperlukan untuk mencapainya secara maksimal.

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan di Distrik Malind mencerminkan upaya signifikan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi dana Otsus ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun berbagai fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, serta fasilitas dasar lainnya, termasuk toilet, ruang guru, dan ruang administrasi. Proses distribusi dana, meskipun telah mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan waktu dan pemerataan. Meskipun ada peningkatan jumlah dana yang dialokasikan, distribusi yang terlambat dan tidak merata menyebabkan beberapa sekolah di daerah terpencil atau dengan tingkat prioritas rendah

belum mendapatkan dukungan yang cukup. Keterlambatan ini berpotensi menunda perbaikan atau pembangunan fasilitas yang sudah direncanakan, yang pada gilirannya menghambat proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan fasilitas yang memadai.

Selain itu, ketidakmerataan distribusi dana juga berakibat pada ketimpangan kualitas sarana prasarana antar sekolah, di mana sekolah-sekolah yang berada di kawasan lebih terjangkau atau lebih dekat dengan pusat pemerintahan cenderung mendapatkan prioritas lebih tinggi. Hal ini menciptakan disparitas yang cukup besar dalam kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau[6]. Dampak dari keterlambatan distribusi dana dan ketidakmerataan tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga menyebabkan beberapa sekolah tidak dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal dalam waktu yang ditentukan[7]. Akibatnya, peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dari perbaikan sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya tercapai, karena fasilitas yang tidak memadai atau terlambat selesai masih mengganggu kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki sistem distribusi dana Otsus agar lebih cepat, efisien, dan merata, serta memastikan bahwa seluruh sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat menerima manfaat yang setara. Sistem koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait juga perlu diperkuat agar penggunaan dana Otsus dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas[8].

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind mengalami beberapa perbaikan berkat alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sebagian besar sekolah telah menerima perbaikan pada gedung dan ruang kelas, yang sebelumnya dalam kondisi rusak atau tidak layak huni[9]. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki fasilitas dasar seperti toilet dan ruang guru, masih banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, yang menggunakan bangunan semi permanen atau bahkan belum menerima perbaikan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran anggaran dan prioritas pembangunan, yang menyebabkan sekolah-sekolah di daerah dengan akses terbatas atau lokasi yang lebih jauh dari pusat pemerintahan seringkali tertinggal dalam hal perbaikan fisik fasilitas pendidikan[7].

Selain itu, ketersediaan mebel sekolah dan alat peraga pendidikan juga menjadi masalah yang signifikan. Beberapa sekolah masih kekurangan meja, kursi, dan peralatan pendidikan lainnya, yang berpengaruh pada kenyamanan belajar siswa. Begitu pula dengan alat peraga, yang masih terbatas penggunaannya di banyak sekolah, padahal alat ini sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Infrastruktur penunjang, seperti jaringan listrik dan akses internet, juga menjadi kendala besar[10]. Sebagian besar sekolah di distrik ini masih menghadapi kesulitan dalam hal ketersediaan listrik yang stabil, dan akses internet yang terbatas membatasi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, meskipun ada perkembangan, kebutuhan untuk meratakan distribusi anggaran dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih sangat mendesak di Distrik Malind.

Peran stakeholder dalam implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Dinas Pendidikan dan pihak distrik memegang peran penting dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan pelaksanaan dana. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi dana Otsus digunakan dengan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan yang telah disepakati[11]. Di tingkat sekolah, kepala sekolah dan komite sekolah memiliki peran vital dalam merencanakan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan serta dalam pelaporan penggunaan dana. Kepala sekolah bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pihak sekolah, sementara komite sekolah memberikan perspektif dari pihak masyarakat yang turut berperan dalam menentukan kebutuhan dan mendukung implementasi program. Sinergi antara Dinas Pendidikan, pihak distrik, kepala sekolah, dan komite sekolah menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Namun, meskipun peran tersebut sudah ada, partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan. Masyarakat, terutama yang berada di kampung-kampung terpencil, seringkali tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus. Minimnya keterlibatan ini mengurangi efektivitas pengawasan serta memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan[12]. Pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar menguntungkan bagi pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan sangat mendukung

keberhasilan implementasi Dana Otsus, serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh elemen pendidikan di Distrik Malind.

Implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam sektor pendidikan di Distrik Malind menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu kelancaran distribusi material, pelaksanaan program, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu masalah utama adalah distribusi material pembangunan yang terhambat oleh faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas. Banyak daerah di Distrik Malind yang terletak di wilayah terpencil, dengan akses transportasi yang sulit dan tidak memadai, sehingga pengiriman material ke lokasi-lokasi tersebut seringkali terlambat atau tidak sampai tepat waktu. Keterlambatan ini menghambat pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, yang pada gilirannya berdampak pada keterlambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan segera[13].

Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat distrik dan sekolah juga menjadi kendala yang signifikan dalam implementasi program. Banyak pelaksana program yang belum memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dalam hal administrasi, pengelolaan dana, serta pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Ketidakmampuan dalam pengelolaan dana dan pelaporan yang buruk menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencairan dana, sehingga memperlambat pelaksanaan pembangunan fisik di sekolah-sekolah yang membutuhkan[14]. Terlebih lagi, koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti Dinas Pendidikan, pemerintah distrik, dan lembaga lainnya, belum berjalan optimal. Ketidakharmonisan antar lembaga ini mengarah pada duplikasi program, pemborosan anggaran, atau bahkan ketidaktepatan dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Hambatan administratif dan teknis lainnya juga turut memperburuk pelaksanaan Dana Otsus di sektor pendidikan[15]. Prosedur yang rumit dan birokratis dalam pengajuan dan pencairan dana seringkali memperlambat implementasi proyek, sedangkan kurangnya pemahaman teknis mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan yang sesuai standar juga menghambat tercapainya hasil yang optimal. Faktor geografis yang menyulitkan distribusi material, ditambah dengan hambatan administratif dan teknis dalam pengelolaan program, mengarah pada ketidakmerataan pembangunan yang berpotensi memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah[16]. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui perbaikan infrastruktur transportasi, peningkatan kapasitas SDM di tingkat pelaksana, dan penyederhanaan prosedur administratif untuk memastikan bahwa Dana Otsus dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Distrik Malind.

Perbaikan infrastruktur yang didorong oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar di Distrik Malind, meskipun dampaknya terhadap kualitas pembelajaran secara keseluruhan masih terbatas. Peningkatan kondisi fisik gedung, ruang kelas yang lebih layak, serta fasilitas dasar seperti toilet dan ruang guru yang lebih memadai, telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas belajar mengajar yang lebih efektif[17]. Namun, meskipun infrastruktur yang lebih baik memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru, dampaknya terhadap kualitas pembelajaran belum begitu signifikan. Perbaikan sarana dan prasarana fisik saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, meskipun infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan kenyamanan, faktor lain seperti peningkatan kapasitas guru dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif juga harus diperhatikan.

Ketimpangan akses pendidikan antar sekolah juga masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa sekolah yang mendapat prioritas pembangunan infrastruktur lebih baik seringkali berada di daerah yang lebih terjangkau atau lebih dekat dengan pusat pemerintahan, sementara sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau masih tertinggal dalam hal fasilitas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, di mana siswa di sekolah-sekolah yang tertinggal tidak mendapatkan fasilitas yang setara dengan sekolah-sekolah yang telah memperoleh prioritas pembangunan. Akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak merata, dan siswa di daerah yang kurang berkembang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang mendukung. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan mutu guru yang sangat dibutuhkan. Guru yang kompeten, terlatih, dan memiliki keterampilan mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, selain memperbaiki sarana dan prasarana, perlu ada upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas fasilitas belajar lainnya seperti alat peraga pendidikan, buku, dan teknologi pembelajaran yang relevan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Distribusi dana yang sering terlambat dan ketidakmerataan alokasi antar sekolah menghambat pencapaian target pembangunan. Perbaikan infrastruktur yang ada telah meningkatkan kenyamanan belajar, tetapi belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, karena masih terdapat ketimpangan antara sekolah-sekolah yang mendapat prioritas pembangunan dan yang tertinggal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pelaksana program yang terbatas, terutama dalam administrasi dan pelaporan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, menyebabkan duplikasi program dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan di lapangan. Masyarakat lokal juga belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak Dana Otsus, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program.

Referensi

- [1] N. Djabu, "Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan," *J. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 208–220, 2023.
- [2] M. Muspawi and M. Lukita, "Pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar," *Lect. J. Pendidik.*, vol. 14, no. 1, pp. 99–110, 2023.
- [3] T. Aprikindesa, "Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Pada Tahun 2017-2022," *J. Ilm. Mhs. Fak. Ilmu Sos. Ilmu Polit.*, vol. 7, no. 3, 2022.
- [4] S. Syarifuddin, R. Rahmattullah, and A. Akmaluddin, "Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar," *Visipena*, pp. 53–74, 2024.
- [5] S. N. Maela and M. Hanif, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Desa oleh Combine Resource Institution untuk Penguatan Penerapan Sistem Informasi Desa," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 13113–13126, 2024.
- [6] A. Idin, N. Nurlaela, and I. Marwan, "Disparitas Kualitas Guru dalam Pendidikan," *Cendekia J. Pendidik. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 193–201, 2024.
- [7] A. Latifa and L. Magriasti, "Analisis Peran Donor MDGs dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik," *Multiverse Open Multidiscip. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 13–19, 2024.
- [8] M. Lamere, "Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua," *J. Gov. Local Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 240–247, 2024.
- [9] F. P. Sianipar and S. T. Maulia, "Kebijakan Pendidikan: Pemerataan dan Perluasan Akses (Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak)," *J. Pendidik. dan Sastra Ingg.*, vol. 3, no. 1, pp. 191–198, 2023.
- [10] M. Mayora, A. S. Tanjung, A. K. Siregar, R. Rehulina, A. A. Hidayah, and R. Harahap, "Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa," *Trending J. Manaj. dan Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 177–185, 2025.
- [11] Y. T. Ina and A. K. Hudang, "Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 5, no. 2. Universitas Islam Indonesia, pp. 1234–1245, 2024. doi: 10.55681/jige.v5i2.2718.
- [12] M. R. Albar and H. Hambali, "Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam (Musrenbang) Di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan," *Almufti J. Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 243–253, 2024.
- [13] D. Satria, I. H. Kusasih, and G. Gusmaneli, "Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur," *J. Bintang Pendidik. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 292–309, 2025.
- [14] E. U. Hida, C. Prateila, M. A. H. Pukada, and D. I. N. Djami, "Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar".
- [15] K. Sinen, "Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya," *J. Sci. Mandalika e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, vol. 6, no. 4, pp. 961–970, 2025.
- [16] I. W. Wijayati, F. H. S. Damanik, and C. L. Prawirosastro, "Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi," *J. Sci. Mandalika e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, vol. 6, no. 3, pp. 671–677, 2025.
- [17] F. Randan, M. A. Todingbua, and A. Buku, "Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire," *J. Compr. Sci.*, vol. 4, no. 2, 2025.